

PENGUATAN PANCASILA SEBAGAI UPAYA MEREVITALISASI DAN MENUMBUHKAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM MASYARAKAT GLOBAL

Oleh:

Achmad Marwan Nurhadi¹,
PPKn, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta²
marwannur@student.uns.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meninjau kembali mengenai pancasila sebagai upaya merevitalisasi dan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat global melihat dari fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini yang kurang memahami mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada era globalisasi saat ini. Disisi lain dalam menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bertolak secara langsung dari problem bangsa dan negara sebagai salah satu bukti kondisi *real* dalam upaya revitalisasi nilai Pancasila. Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan penelitian Studi kasus. Penelitian ini mengacu pada keadaan atau kondisi saat ini yang sedang dialami atau fenomena yang sedang bergulir di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan studi dokumen atau studi pustaka untuk mendapatkan data untuk menjaga keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan serta menggali data. Kemudian dari studi pustaka maupun dari studi dokumen. Di temukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar kita untuk hidup berbangsa dan bernegara serta mewujudkan masyarakat yang madani pada era globalisasi seperti saat ini. Pancasila memiliki nilai filosofis yang begitu penting yakni sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sebagai ideologi nasional maka Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kemudian nilai Pancasila sebagai identitas nasional pada hakikatnya merupakan sebuah manifestasi dari luhur nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khasnya dan dengan ciri khas itulah yang nampak dari suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lain. Selain itu terdapat sebuah tantangan yang harus dihadapi bangsa indonesiapada jaman globalisasi saat ini peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Lembaga pendidikan merupakan ujung tombak yang efektif pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda.

Kata kunci: *Revitalisasi, Pancasila, Identitas Nasional*

-
1. Nama Penulis
 2. Asal instansi, kota
 3. Alamat email

PENDAHULUAN

Nilai-nilai Pancasila sekarang ini kian hari kian terkikis, hal ini dibuktikan dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh bangsa ini. Tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan justru dimunculkan sehingga memicu terjadinya berbagai perselisihan, permusuhan maupun perpecahan. Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Pada setiap jamannya, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Pancasila sebagai dasar negara saat ini cenderung dipandang hanya sebatas simbol yang mulai kehilangan roh dan makna filosofinya. Tidak mengherankan, apabila saat ini Nasionalisme ataupun Wawasan kebangsaan ke-Indonesia-an, menjadi barang mewah yang sangat sulit ditemukan di kalangan generasi muda. Wawasan kebangsaan bukan merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas atau bahkan menjadi *trendsetter* dalam kehidupan kalangan muda. Mungkin ada benarnya bila banyak orang menyimpulkan bahwa generasi muda Indonesia sedang mengalami krisis wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan, kini terasa menjadi sesuatu yang bersifat abstrak tak tersentuh dan mengalami sebuah pendangkalan makna secara mendasar. Globalisasi yang menembus batas-batas negara telah mengaburkan persepsi dan wawasan kebangsaan, sesuatu yang justru merupakan hal yang sangat esensial dalam mempertahankan eskistensi dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, berbicara soal wawasan kebangsaan akan terdengar asing, dan bagi mereka yang berapi-api membelanya akan dianggap sebagai anomali ditengah kehidupan modern. Salah satu tantangan dalam pergeseran seisme global era baru, yakni meningkatnya kompetisi

secara eksponensial, dimana teknologi telah membuat satu negara dapat bersaing dengan negara lain, untuk itu secara terus-menerus diperlukan inovasi dan pengembangan baru untuk berkompetisi dengan negara lain, melalui inovasi dan efisiensi, namun tetap mengedepankan kualitas.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki makna yang sangat jelas bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai dasar Negara setidaknya perlu dipahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar ataupun pondasi bagi bangsa ini dalam segala penyelenggaraan ketatanegaraan. Pancasila sebagai dasar pembentukan norma hukum dan norma etik bagi bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagai cita-cita bangsa Indonesia dan alat pemersatu bagi bangsa ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan penelitian Studi kasus. Penelitian ini mengacu pada keadaan atau kondisi saat ini yang sedang dialami atau fenomena yang sedang bergulir di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan studi dokumen untuk mendapatkan data untuk menjaga keabsahan dan kebenarandata yang dikumpulkan. Sedangkan pendekatan pengembangannya mengacu Studi kasus (Maxfield, 1930), penelitian study kasus (*case study*), adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, globalisasi merupakan proses hubungan antarbangsa yang sudah terjadi sejak berabad lalu. Proses ini berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong hubungan sosial dan saling ketergantungan antarbangsa, antarnegara dan antar manusia semakin besar. Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, telah merubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek dan menjadikan globalisasi sebagai fenomena yang bersifat multidimensi. Negara seolah tanpa batas (*borderless*), saling tergantung (*interdependency*) dan saling terhubung (*interconnected*) antara satu negara dengan negara lainnya.

Sementara itu, dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang semakin menguat melalui konsep pasar bebas dalam lingkup global maupun regional. Di tengah kuatnya arus globalisasi yang ditandai dengan persaingan global, saat ini tidak ada satupun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri. Saling ketergantungan dan saling keterhubungan merupakan hal yang sulit untuk dihindari.

Era reformasi yang diawali krisis moneter tahun 1998, merupakan bukti kuatnya pengaruh globalisasi terhadap dinamika kehidupan nasional. Sejak era reformasi digulirkan tahun 1998, dari perspektif kehidupan demokrasi, kehidupan politik nasional mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, menjadi ciri kehidupan masyarakat sehari – hari.

Globalisasi mau tidak mau hanya bisa diterima. Namun demikian, sikap kritis terhadap dampak-dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi perlu dilakukan. Sebagai contoh masuknya investor dan perusahaan asing ke Indonesia, di satu sisi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun demikian, bila perusahaan asing tersebut sewenang-wenang atau merusak lingkungan, seluruh

bangga Indonesia wajib mengkritisi atau melawannya. Sikap kritis juga berlaku terhadap pengaruh nilai-nilai budaya luar. Di satu sisi, budaya luar dapat memperkaya budaya Indonesia. Tetapi di sisi lain, harus diakui bahwa tidak semua nilai-nilai tersebut sesuai dengan budaya orang Indonesia. Kita dapat bersikap kritis terhadap pengaruh globalisasi dan menyaring nilai-nilai yang masuk dari luar, bila kita mampu memperkuat nilai-nilai kepribadian bangsa. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai adat, nilai-nilai moral, dan agama yang diwariskan nenek moyang.

Di satu sisi, pencapaian ini tentu saja merupakan kemajuan dan prestasi besar bangsa. Namun di sisi lain, tidak dapat disangkal, bahwa keseharian kehidupan masyarakat telah diwarnai pola pikir, pola sikap dan pola tindak individualistis dan kelompok. Masyarakat luas, dalam berbagai tataran, telah mengadopsi nilai – nilai baru yang belum sepenuhnya dipahami serta diyakini kebenaran dan kesesuaiannya dengan karakter bangsa. Sementara, nilai – nilai luhur bangsa dianggap sebagai nilai lama yang usang dan sudah tidak relevan dengan semangat reformasi yang sarat dengan semangat perubahan. Semangat perubahan telah diartikan secara hitam putih dan bahkan cenderung pragmatis tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkannya.

Dinamika kehidupan nasional berjalan sangat dinamis tapi kontra produktif bagi penguatan wawasan kebangsaan. Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang sangat jauh berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan semangat kegotongroyongan, keseimbangan, kerjasama, saling menghormati, kesamaan, dan kesederajatan dalam hubungan manusia dengan manusia. Perubahan tata nilai dan tata laku sebagian besar komponen bangsa tercermin dari sikap pragmatisme dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.

Filosofi Yang Termuat Pada Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan dasar ataupun

pondasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai *groundnorm* atau *staatsfundamentalnorm* bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sebagai ideologi nasional maka Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia

Pancasila juga merupakan sebuah *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Kemudian nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik sebagai tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai negara hukum formal maupun cita-cita kenegaraan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu : (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial Kaelan, (2013: 45-46).

Secara kultural, dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan religiusitas yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Sedangkan dalam proses pendirian negara, dengan diilhami pandangan-pandangan dunia tentang kenegaraan disintesis secara eklektis, sehingga merupakan suatu local genius dan sekaligus sebagai suatu local wisdom bangsa Indonesia Kaelan, (2013: 47). Oleh karenanya Pancasila secara ontologis tidak dapat dibantah bahwa Pancasila adalah suatu substansi (Sunoto, 1984:70)

Poespowardoyo (1989:5), lebih lanjut menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila secara fragmentaris terdapat dalam kebudayaan bangsa, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan dan pemikiran lainnya. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh para

pendiri bangsa dan negara kemudian dikembangkan dan secara yuridis disahkan sebagai suatu dasar negara, dan secara verbal tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila juga merupakan suatu konsensus yang tertuang dalam suatu cita-cita serta tujuan bersama dalam suatu landasan filosofis, *the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government*. Dalam proses ketatanegaraan Indonesia, proses perumusan tentang cita-cita bersama yaitu dasar filosofis negara, diawali dengan terbentuknya BPUPKI, yang diawali dengan sebuah konsensus yang disebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga perubahan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan fakta sejarah itu pula, maka Pancasila merupakan suatu hasil philosophical consensus (konsensus filsafat), karena membahas dan menyepakati suatu dasar filsafat negara, dan *political consensus* (konsensus politik) Kaelan, (2013: 48-49).

Pancasila secara filosofis telah melintasi rangkaian panjang fase “pembuahan”, fase “perumusan”, dan fase “pengesahan”. Fase “pembuahan” setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan, seiring dengan proses “penemuan” Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*). Fase “perumusan” dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI dengan Pidato Soekarno (1 Jun) sebagai *creme de la creme*-nya yang memunculkan istilah Panca Sila, yang digodok melalui pertemuan *Chuo Sangi In* dengan membentuk “Panitia Sembilan” yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno dalam versi Piagam Jakarta. Fase “pengesahan” dimulai sejak 18 Agustus 1945 yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan negara Yudi Latif, (2011: 39).

Pancasila menurut Yudi Latif, (2011: 2) warisan dari pendiri bangsa ini kepada setiap generasi bangsa. Lima (5) prinsip dalam Pancasila seolah memberikan

landasan berbangsa dalam tiap generasi kebangsaan kita. Cita-cita bangsa Indonesia pun tertuang secara jelas dalam sila-sila Pancasila. Para pendiri bangsa menjadikan tiga abad lebih pengalaman kolonialisasi di Indonesia sebagai cermin dalam melihat masa depan bangsa Indonesia. Maka terciptalah Pancasila sebagai landasan bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat yang pancasilais. Masyarakat yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yakni masyarakat yang menjadikan pancasila sebagai landasan hidup ber Indonesia

Pancasila Sebagai Identitas Nasional

Identitas nasional berasal dari kata *identity* yang berarti ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada sesuatu yang membedakan dengan yang lain dan kata nasional yang berarti kelompok lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik seperti budaya, agama, dan bahasa dan kesamaan non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan Widodo, dkk. (2015: 2-3). Pada hakikatnya identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain Monteiro, (2015: 27).

Dengan demikian, identitas nasional menunjuk pada jati diri yang bersumber dari nilai-nilai budaya suatu bangsa sehingga identitas nasional memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan nasional. Pada konteks ke-Indonesiaan, identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang paling utama dan terutama bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Identitas tersebut menunjuk pada lambang, simbol atau identitas yang bersifat nasional seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Guna menjaga identitas nasional, maka rasa cinta tanah air dan integrasi nasional menjadi satu hal yang penting. Dapat kita simpulkan identitas nasional pada hakikatnya merupakan sebuah manifestasi dari luhur nilai-nilai budaya

yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khasnya dan dengan ciri khas tersebutlah suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lain. Sehingga dengan demikian, maka identitas nasional akan melahirkan tindakan kelompok yang disebut atribut nasional.

Tantangan Yang Harus Di Hadapi Bangsa Indonesia

Guna untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan Negara , pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2011, telah menerbitkan Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila

Dalam Permendagri No. 29 Tahun 2011 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila, meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Sedang revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aktualisasinya adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan Pancasila memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme;
2. Memberikan arah kepada pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
3. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara dan pemerintahan di tingkat daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan.

Demikian antara lain diatur dalam Permendagri No. 29 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2011.

Pelibatan lembaga-lembaga tersebut untuk menghasilkan peraturan perundangan yang memperkuat upaya-upaya revitalisasi Pancasila secara demokratis dan bermartabat. Upaya yang bersifat praktis ditujukan untuk mendukung upaya-upaya politis melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, *penyuluhan dan training of trainer (ToT)* tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan. Sedangkan upaya yang bersifat operasional dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Hal ini dilakukan mengingat lembaga pendidikan merupakan ujung tombak yang efektif pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda. Dalam tataran operasional, satu hal penting dan mendasar yang perlu dikembangkan adalah teladan secara nyata. Teladan merupakan kata kunci dan kekuatan moral yang akan menentukan berhasil tidaknya upaya revitalisasi nilai – nilai empat konsensus nasional yang dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari pola dan budaya bangsa Indonesia yang bersifat patriarchy dan paternalistik, sehingga teladan para pemimpin merupakan sarana efektif untuk membangun watak dan karakter bangsa, khususnya di kalangan generasi muda bangsa.

PENUTUP

Harus diakui secara jujur, era reformasi yang membawa semangat perubahan dan keterbukaan telah membawa banyak perubahan positif maupun negatif bagi kehidupan nasional. Keterbukaan dan kebebasan individu yang merupakan ciri demokrasi barat semakin mendominasi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa. Semangat gotong royong yang merupakan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pancasila, pada kondisi saat ini mulai dikesampingkan dan diabaikan. Tata nilai baru yang belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh bangsa

Indonesia telah mengakibatkan disharmonisasi hubungan vertikal maupun horisontal di antara masyarakat Indonesia yang majemuk.

Berbagai permasalahan bangsa yang terjadi akhir-akhir ini, disebabkan semakin lunturnya toleransi atas perbedaan dan kemajemukan di antara komponen bangsa. Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa dalam susunan Supra struktur, Infra struktur dan Sub struktur politik harus mampu membangun kembali dan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai rangsangan dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme.

Sebagai salah satu komponen bangsa strategis, Perguruan Tinggi beserta jajaran civitas akademiknya memiliki peran, tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis dalam membangkitkan kembali Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk memperkuat watak dan karakter bangsa. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi perlu terus meningkatkan perannya secara aktif dalam menyusun dan mensosialisasikan upaya revitalisasi nilai luhur Pancasila dalam rangka memelihara jati diri ke-Indonesia-an di kalangan generasi penerus yang sarat dengan nilai moral dan etika; kejujuran, kompetensi dan nilai-nilai kebangsaan.

Kecerdasan intelektual yang merupakan potensi besar yang dimiliki perguruan tinggi dan civitas akademiknya juga harus mampu dikembangkan secara seimbang dengan kecerdasan, emosional, kecerdasan moral dan kecerdasan spiritual.

Keseimbangan tersebut dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pembentukan watak dan karakter bangsa, baik secara kolektif maupun individual, berdasarkan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Itulah yang sesungguhnya harus disadari dan dipahami oleh kalangan perguruan tinggi beserta civitas akademiknya

dalam partisipasinya untuk memperkuat wawasan kebangsaan guna meningkatkan Ketahanan Nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan hal ini antara lain karena keterbatasan penulis. Meskipun demikian, penulis berharap semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, Dasim, 2010 Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa, Widya Aksara Press: Bandung
- Monteiro, Josef M. 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa Ed.1, Cet.2*. Deepublish: Yogyakarta.
- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma
- Pasha, Musthafa Kamal, Lasiyo, Fahmi Muqodas, Mudjiyana, 2000, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri: Yogyakarta.
- Rahayu, Minto, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*, Grasindo: Jakarta
- Soros, Goerge, 2002, *Krisis Kapitalisme Global (Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya)* terjemahan *The Crisis of Global Kapitalism* oleh Dindin Solahudin, Qalam: Yogyakarta
- Widodo, Wahyu, dkk, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grasindo: Yogyakarta.

Makalah:

- Dasim Budimansyah. 2012. *Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar Bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Stadium General PKN tanggal 7 September 2012 di UNS Solo.

Peraturan:

- UUD NRI 1945 Amandemen
Peraturan Menteri Dalam Negri No. 29 Tahun 2011